

## **ANALISIS JAMINAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA KELAS**

**<sup>1</sup>Annisa Saliha, <sup>2</sup>Arya M Albery, <sup>3</sup>Huda Abshar Abdhallah, <sup>4</sup>Lidia Dwi Syaputri,**

**<sup>5</sup>Tamrin, <sup>6</sup>Lusi Puspika Sari**

<sup>1,2,3,4,5,&6</sup> Ilmu Politik, Universitas Andalas

Email:

aryaberry2017@gmail.com,

### **Abstrak**

Negara sangat berperan dan memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya, salah satunya dalam bentuk kewajiban untuk memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat di negara tersebut. Analisis ini menggunakan perspektif negara kelas marxis yaitu adanya kelas sosial dalam masyarakat, tentang adanya pembagian kelas sosial yang timbul dari adanya mode produksi, sebagai pengendali sistem produksi (pemilik modal) dan produsen yang penyedia layanan langsung untuk kelas dominan (buruh). Karl Marx (1818-1883) memandang bahwa sejatinya aktor utama yang berperan penting dalam kelangsungan hidup suatu masyarakat adalah kelas-kelas sosial. Keterasingan yang dialami manusia pun sesungguhnya adalah hasil penindasan satu kelas oleh kelas lainnya. Untuk menghapuskan tindakan eksploitatif tersebut, Karl Marx mengemukakan perjuangan atau revolusi kelas. Karl Marx yakin bahwa kelas-kelas yang terbentuk pada suatu masyarakat dapat dihapus dengan revolusi tersebut sehingga keadilan pun dapat ditegakkan. Tujuan penelitian ini untuk melihat dan mencari tahu perspektif negara kelas yang dikemukakan oleh Marx terhadap bagaimana suatu negara menunaikan tanggung jawabnya dalam hal pelayanan kesehatan yaitu jaminan kesehatan. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan atau observasi serta dilakukan wawancara.

**Kata Kunci: jaminan kesehatan; keadilan; perspektif; kelas; negara.**

### **Abstract**

The state plays a very important role and has an obligation to meet the needs of its people, one of which is in the form of the obligation to fulfill public health services in the country. This analysis used the perspective of a Marxist class state, namely the existence of social classes in society, regarding the existence of social class divisions that arise from the existence of modes of production, as controllers of the production system (owners of capital) and producers who provide direct services for the dominant class (workers). Karl Marx (1818-1883) saw that actually the main actors who play an important role in the survival of a society are social classes. The alienation experienced by humans is actually the result of the oppression of one class by another class. To eliminate these exploitative actions, Karl Marx put forward a class struggle or revolution. Karl Marx believed that the classes that were formed in a society could be removed by this revolution so that justice could be upheld. The purpose of this study is to see and find out the perspective of country class put forward by Marx on how a country fulfills its responsibilities in terms of health services, namely health insurance. The research method used is a descriptive qualitative research method, using data collection techniques through observation or observation and interviews.

**Keywords: Health Security; Justice; Perspective; State; Class**

## **PENDAHULUAN**

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, sehingga kesehatan merupakan hak bagi setiap warga negara yang telah dilindungi oleh undang-undang. Kesehatan adalah modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan disuatu negara. Sehingga perbaikan pelayanan itu adalah investasi terbesar sumber daya manusia agar mencapai masyarakat yang sejahtera. Di dalam Pasal I Nomor 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, kesehatan adalah kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomi. Jaminan hak atas kesehatan juga terdapat dalam Pasal 12 Ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, yaitu bahwa negara peserta kovenan tersebut mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental.

Upaya yang dilakukan negara dalam melakukan pelayanan kesehatan adalah mengeluarkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Yang dimana

program tersebut diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), BPJS ini merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). JKN ini digunakan pemerintah untuk membantu masyarakat kecil yang kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam pasal 14 UU BPJS bermakna bahwa semua orang baik itu anak-anak ataupun dewasa, orang kaya ataupun orang miskin, mereka semua diwajibkan untuk mengikuti program JKN dari BPJS. Yang tentunya hal ini bertentangan dengan tujuan pemerintah itu sendiri dalam mengeluarkan program JKN ini, yaitu target program ini adalah membantu masyarakat miskin yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan kesehatan.

Namun saat ini jaminan kesehatan belum bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Juga dapat dilihat perbedaan pelayanan kesehatan antara orang miskin dan orang kaya yang menggunakan program jaminan kesehatan tersebut. Bisa disimpulkan

bahwa hingga kini pelayanan kesehatannya masih melihat dari latar belakang keluarga dan perekonomian masyarakat. Padahal setiap warga negara itu memiliki hak yang sama, dalam lingkup nasional, Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sehingga dapat dilihat ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya pengguna JKN, serta masyarakat miskin pengguna JKN dengan masyarakat kaya yang tidak menggunakan JKN.

Melihat fenomena diatas yang telah dipaparkan, menarik jika dikaitkan dengan teori konsep Negara Kelas yang dikemukakan oleh Karl Marx. Teori kelas Marxisme bertumpu pada konsep bahwa sejarah yang telah kita ketahui sampai saat ini dapat dianggap sebagai sejarah perjuangan antara kelas-kelas sosial. Dalam teori kelas, dipercayai bahwa kelas-kelas sosial adalah pelaku utama dalam masyarakat. Sebagai contoh, ketidakadilan dan alienasi yang dialami oleh manusia merupakan akibat dari penindasan yang dilakukan oleh satu

kelas terhadap kelas lainnya. Marx dalam teorinya memisahkan masyarakat berdasarkan mode produksinya. Dari setiap mode produksi tersebut, timbul sistem kelas yang berbeda di mana satu kelas memiliki kendali atas sistem produksi (kelas pemilik modal), sementara kelas lainnya bertindak sebagai produsen dan penyedia layanan langsung untuk kelas yang dominan (kelas buruh). Faktor ekonomi memegang peran penting dalam menentukan hubungan sosial dalam masyarakat kapitalis.

Pembagian kelas sosial tersebut akan membentuk sebuah negara kelas. Menurut Marx, negara secara hakiki merupakan negara kelas yang berarti negara secara langsung ataupun tidak langsung diduduki oleh kelas yang menguasai segi ekonomi. Berkaitan dengan itu, negara bukanlah sebuah lembaga yang mengatur masyarakat secara objektif, melainkan merupakan alat untuk mempertahankan kekuasaan kelas atas. Negara tidaklah netral, melainkan memihak pada satu kelas tertentu. Negara seringkali hanya menyamar sebagai lembaga yang bertindak demi kesejahteraan rakyat, namun pada kenyataannya, itu hanyalah sebuah strategi untuk menipu kelas

pekerja. Maka jelas adanya kaitan fenomena yang telah dijelaskan dengan teori negara kelas dimana pelayanan jaminan kesehatan yang diberikan oleh negara masih melihat perbedaan kelas antara kelas orang kaya dengan orang miskin. Perbedaan ini sesuai dengan pemaparan Marx bahwa negara tidak lagi netral dan berisi kepentingan terhadap satu kelas tertentu. Sehingga pelayanan yang harusnya diberikan merata dan sama tidak terwujud dalam fungsi negara dalam menjamin kesehatan seluruh warga negaranya

Salah satu permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia adalah adanya pembagian kelas perawatan yang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pembagian kelas perawatan rawat inap yang ada saat ini dinilai tidak sesuai dengan amanat UU SJSN dan UU BPJS, yang menyebutkan bahwa kelas perawatan bagi peserta yang membutuhkan rawat inap menggunakan kelas standar tanpa ada pembagian kelas. . Masalah yang terjadi saat ini saat ini adalah munculnya

masalah dimana di suatu daerah ternyata suatu daerah ternyata pasien BPJS ditelantarkan oleh ditelantarkan oleh rumah sakit tertentu, kemudian timbul masalah bahwa banyak masyarakat yang belum paham tentang prosedur dan standar pelayanan yang menjadi hak mereka ketika menggunakan fasilitas BPJS, perbedaan antara informasi yang diperoleh dari yang diperoleh dari petugas BPJS dengan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat ketika yang dihadapi masyarakat ketika mendapatkan pelayanan di rumah sakit.

Perbedaan antara informasi yang didapatkan dari petugas BPJS dengan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat ketika mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Hal ini disampaikan oleh salah satu salah satu perwakilan dari manajemen BPJS Kesehatan yang mengatakan bahwa masyarakat tidak akan diperlakukan berbeda dengan pasien lain namun pada kenyataannya masyarakat diperlakukan berbeda dengan pasien lainnya, namun kenyataannya di lapangan banyak masyarakat yang tidak diperlakukan berbeda dengan pasien lainnya dan masih banyak masyarakat yang merasa terdiskriminasi

Dalam kaitannya dengan pelayanan BPJS, salah satu rumah sakit milik pemerintah khususnya pemerintah daerah kota Surabaya, yaitu RSUD Mr. Mohammad Soewandhie menjadi salah satu kasus yang peneliti soroti. Dalam sebuah kasus tersebut, dialami oleh Ibu Asiasi berusia 52 tahun warga Kali Kedinding Surabaya. Pihak keluarga mengeluhkan antrian selama 3 hari untuk menunggu kamar di ICU. Sehingga pasien tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka peneliti dapat berasumsi adanya keterkaitan jaminan pelayanan kesehatan di Indonesia dengan kelas sosial dan menarik jika dibandingkan dengan perspektif Negara Kelas yang menggunakan teori negara kelas marxis dikemukakan oleh Karl Marx. Maka peneliti dapat merumuskan masalahnya yaitu: Bagaimana perspektif negara kelas terhadap jaminan kesehatan di Indonesia.

#### **METODE**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan lebih cenderung menggunakan analisis yang dimana lebih

mengutamakan proses dan maknanya. Disamping itu metode yang digunakan ada studi kepustakaan (library research), studi kepustakaan adalah upaya pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yang diperoleh dari karya tulis ilmiah, buku, koran, berita serta bahan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian.

Menurut Abdul Rahman Sholeh, studi kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, serta catatankisah sejarah. Sehingga, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung atau melalui perantara, yang di mana peneliti memperoleh informasi tidak secara langsung dari peneliti kepada informan.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan ini adalah untuk meneliti fenomena terkait perbedaan kelas dalam jaminan Kesehatan dengan menggunakan perspektif negara kelas. Penelitian ini berupaya untuk menggambarkan fakta-fakta empirik yang terjadi untuk melihat kebenaran

dari fenomena tersebut dengan cara menelaah sumber-sumber yang telah ada, serta mengumpulkan informasi teoritis dan ilmiah melalui bahan bacaan yang relevan dengan penelitian. Sehingga akan diperoleh hasil yang valid dan dapat dipercaya. Penggunaan metode penelitian ini agar penelitian bisa ditulis dan disusun dengan efisien serta kompleks, sehingga dapat menjawab tujuan dari penelitian. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana fenomena perbedaan kelas dalam jaminan Kesehatan serta efektivitas kelas standar dalam jaminan Kesehatan dalam perspektif negara kelas.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lembaga negara Ombudsman RI menerima banyak laporan pengaduan terkait adanya praktik layanan kesehatan yang mendiskriminasi para pengguna BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) baik dalam pelayanan maupun fasilitas Kesehatan. Salah satu kasus yang terjadi di Rumah Sakit Soewandhie, Surabaya. Pada kasus ini dialami oleh Ibu Asiasi berusia 52 tahun warga Kali Kedinding Surabaya. Pihak keluarga mengeluhkan antrian selama 3 hari untuk menunggu kamar di ICU. Sehingga

pasien tidak mendapatkan ruang perawatan dan pihak keluarga menyayangkan karena tidak diberikan tindakan lebih lanjut yang cepat dari rumah sakit dan pasien tidak tertolong sampai akhirnya meninggal dunia. Pada kasus ini terlihat bahwa adanya perbedaan antara kelas dalam jaminan kesehatan. Padahal negara memiliki kewajiban dalam memberikan jaminan Kesehatan kepada seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi. Dalam pelayanan dan fasilitas Kesehatan, pasien umum atau pasien dengan asuransi akan lebih diutamakan dan pasien BPJS menjadi terbelakangi sehingga kerap menerima antrian panjang.

Berdasarkan fenomena diatas menarik jika dianalisis dan dikaitkan dengan teori kelas dalam perspektif negara kelas yang dikemukakan oleh Karl Marx. Marx memiliki pandangan bahwa pelaku utama dalam perubahan sosial bukanlah individu melainkan kelas-kelas sosial. Dalam setiap warga terdapat kelas yang menguasai dan kelas yang dikuasi. Lebih jelasnya dibagi menjadi kaum borjuis (pemodal) dan kaum proletariat (buruh). Selanjutnya marx memahami kelas sosial tersebut hadir dala negara sebagai bagian dari

dinamika yang terjadi di masyarakat. Ada dua faktor utama menurut marx yang dikaitkan tentang negara:

Pertama, negara merupakan bagian dari politik yang merepresentasikan kepentingan kelas sosial dominan, termasuk dominasi modal atas tenaga kerja.

Kedua, negara merupakan bagian dari politik yang menjamin keberlangsungan akumulasi modal atau kapital tanpa gangguan perjuangan kelas.

Berdasarkan pemaparan Marx diatas disimpulkan bahwa gagasan Marx berbanding terbalik dengan realitas yang terjadi di Indonesia khususnya seperti kasus sebelumnya mengenai jaminan kesehatan kepada masyarakat. Marx meniadakan penindasan oleh kaum penguasa dan menolak negara sebagai struktur yang sepenuhnya otonom, melainkan marx menganggap negara sebagai sebuah sistem dominasi politik yang bersifat abstrak yang menolak sifat sosial manusia dan mengasingkan manusia dari kehidupan publik. Dimana para pejabat pemerintah sebagai aktor-aktor yang mempresentasikan kepentingan pribadi dan melihat upaya birokrasi mengendalikan kekuasaan negara.

Berdasarkan fenomena atau kasus dengan konsep negara kelas yang dikemukakan oleh marx, bahwa Indonesia tidak lagi menjadi negara demokrasi secara keseluruhan. Adanya kelas sosial dalam masyarakat sesuai dengan paparan marx dalam teorinya yang dimana kelas sosial tersebut juga sudah terjadi dalam birokrasi di Indonesia sehingga negara tidak lagi berdiri sendiri (otonom) akan tetapi berdiri atas kepentingan-kepentingan aktor yang menguasainya.

Sejalan dengan kasus diskriminasi BPJS di Indonesia perbedaan kualitas pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada masyarakat terlihat jelas adanya pengaruh basis ekonomi. Kelas tinggi akan didahulukan sedangkan kelas rendah akan diabaikan sehingga kesejahteraan tidak terlihat dalam sebuah kehidupan masyarakat sebab negara menjadi alat kekuasaan yang menguasai golongan yang lemah dan berubah menjadi masyarakat tidak bernegara dan tidak memiliki kelas. Negara akan tetap menjadi organisasi selama hak milik masih memegang peranan penting.

---

## KESIMPULAN

Marx memiliki pandangan bahwa pelaku utama dalam perubahan sosial bukanlah individu melainkan kelas-kelas sosial. Dalam setiap warga terdapat kelas yang menguasai dan kelas yang dikuasai. Lebih jelasnya dibagi menjadi kaum borjuis (pemodal) dan kaum proletariat (buruh). Marx menolak negara sebagai struktur yang sepenuhnya otonom, melainkan Marx menganggap negara sebagai sebuah sistem dominasi politik yang bersifat abstrak yang menolak sifat sosial manusia dan mengasingkan manusia dari kehidupan publik.

Berdasarkan fenomena atau kasus dengan konsep negara kelas yang dikemukakan oleh Marx, bahwa Indonesia tidak lagi menjadi negara demokrasi secara keseluruhan. Sejalan dengan kasus diskriminasi BPJS di Indonesia perbedaan kualitas pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada masyarakat terlihat jelas adanya pengaruh basis ekonomi.

## REFENSI

Ardinata, M. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Manusia. Jurnal HAM, 11(2), 319-332.  
Bphn.2017.[https://bphn.go.id/data/documents/ae\\_pemenuhan\\_hak\\_kesehat](https://bphn.go.id/data/documents/ae_pemenuhan_hak_kesehat)

an.pdf diakses pada tanggal 11 Juni 2023 pukul 06.06.

Franz Magnis Suseno (2010). Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 110-134. ISBN 978-979-655-331-0.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2013/12TAHUN2013PERPRES.HTM>

<https://nakita.grid.id/read/023450352/perlu-tahu-perbedaan-bpjs-kelas-1-2-dan-3-apa-saja-fasilitas-kesehatannya?page=all>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210920175751-4-277755/kelas-standar-bpjs-kesehatan-bakal-munculkan-masalah-baru>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220805133724-83-830726/kenali-perbedaan-bpjs-kesehatan-kelas-1-2-dan-3>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/8-masalah-penghambat-jaminan-kesehatan-nasional-lt57bd0ba444be5/>

<https://www.linovhr.com/fasilitas-bpjs/>  
Joni Afriko, Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasinya Dilengkapi UU Kesehatan dan Keperawatan. (Bogor: IN MEDIA, 2016), 21.



- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. Metode Penelitian Sosial, 33.
- Nursyamsi. 2018. Kebijakan Pemerintah Terhadap Program BPJS Kesehatan (Study Kasus Masyarakat Desa Bontobiraeng Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa). Skripsi. Makassar.
- Putri, N. E. (2014). Efektivitas Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui BPJS dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kota Padang. *Tingkap*, 10(2), 175-189.
- Retnaningsih, H. 2013. Program Jaminan Sosial di Kabupaten Jembrana dan Kota Yogyakarta. *Aspirasi* vol.4 no. 1.
- Surahmawati. 2015. Kualitas Pelayanan Kesehatan di RSUD Daerah Baru (Kasus Pelayanan Rawat Jalan Pasien Pengguna Asuransi Kesehatan). Makassar.
- Suseno, Franz Magnis. 1999. Pemikiran Karl Marx: Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme.
- Zeithaml. 2015. Indikator Kualitas Pelayanan Publik.